

## **Civic Engagement Menggunakan Media Online di Kalangan Anak Muda Kota Padang**

**Yayuk Lestari**

**Jurusan Ilmu Komunikasi-Universitas Andalas  
Kampus Unand Limau Manis, Padang-25163  
No Telp./HP: (0751) 71266/ 1089624404395  
Email: [lestari.yayuk11@yahoo.com](mailto:lestari.yayuk11@yahoo.com)**

### **Abstrak**

Perkembangan internet yang cepat memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kontribusi internet terhadap pembentukan *civic engagement*, yakni isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Kehadiran internet memunculkan kekhawatiran semakin suburnya nilai-nilai individualis terutama di kalangan anak muda.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana bentuk partisipasi publik terutama kalangan anak muda di Kota Padang dan bagaimana peranan media online (sosial media) terhadap partisipasi anak muda di isu-isu untuk kepentingan umum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, kuesioner sebagai teknik pengumpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di satu sisi internet memang menjauhkan anak muda dengan isu-isu politik, namun isu-isu sosial, pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama anak-anak muda di Kota Padang. Merasa suara tidak didengar dan tidak penting menjadi alasan keenganan untuk terlibat di isu-isu politik.

**Kata Kunci:** *Civic Engagement, Media Online, Media Consumption, Digital Activism, Kota Padang*

### **Abstract**

The rapid development of the Internet raises questions about how the Internet contributes to the formation of civic engagement, including issues related to public interest. Internet presence raises concerns increasingly fertile individualist values, especially among young people.

This study intended to investigate form of public participation, especially among young people in the city of Padang and how the role of online media (social media) on the participation of young people in issues of public interest.

This research is uses qualitative and quantitative methods with interviews, observations, questionnaires as data collection techniques. Social issues, education and health is a major concern young people in the city of Padang, meanwhile political issues are not preference. Political efficacy is the reason for the reluctance to get involved in political issues.

**Keywords:** *Civic Engagement, Media Online, Media Consumption, Digital Activism, Kota Padang*

### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi komunikasi berkembang sangat cepat, hampir setiap hari kita akan menemukan adanya perkembangan teknologi komunikasi terbaru, mulai dari aplikasi hingga device yang digunakan. Bukan hanya dari segi inovasi yang begitu cepat, namun masyarakat kita begitu cepat mengadaptasi teknologi terbaru ini. Salah satu contoh bagaimana cepatnya masyarakat kita mengadopsi teknologi bisa dilihat dari perkembangan smartphone yang sangat cepat di Indonesia. Kalangan muda menjadi pengadopsi teknologi yang otodidak atau biasa disebut digital immigrant. Tanpa perlu diajarkan para digital immigrant ini bukan hanya menjadi pengkonsumsi media, namun bahkan mampu menjadi produser seperti aplikasi. Tak heran hampir setiap hari banyak aplikasi-aplikasi baru bermunculan. Salah satu keuntungan dengan adanya teknologi seperti internet ini adalah informasi yang mudah diakses dan cepat, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang diperlukan lewat internet.

Idealnya, melalui media masyarakat bisa memperoleh, membangun sekaligus menyebarkan wacana atau opini yang dianggap penting bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Media secara tidak langsung telah menghubungkan masyarakat dengan isu-isu publik (*public concerns*) tanpa dibatasi jarak dan waktu. Lewat social media misalnya, sebuah isu bisa cepat berkembang dan dibicarakan secara massal. Namun dari hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap media, terutama media konvensional. Media dianggap tidak netral atau ditunggangi oleh kepentingan. Hal ini membuat masyarakat semakin menjauh dengan isu-isu publik, terutama anak muda yang memilih untuk mengonsumsi konten non-politik. Hasil dari penelitian kami memperlihatkan kecenderungan masyarakat lebih mengonsumsi konten di media massa yang membahas tentang kriminalitas, gossip dan isu sosial

Salah satu indikasi keterasingan masyarakat di Kota Padang dengan isu-isu publik adalah ketika pemilihan umum atau daerah mereka tidak berinisiatif untuk mencari informasi tentang pilihan dan informasi politik. Fenomena enggan masyarakat terlibat aktif dalam bertindak atau hanya sekedar mencari informasi juga terlihat pada Pilkada daerah salah satunya di Pilkada Provinsi Sumatera Barat tahun 2016. Pada pilkada ini angka Golput mencapai 41,38%. Keengganan masyarakat untuk terlibat atau mencari tahu informasi yang berkaitan dengan isu-isu publik juga bisa dilihat dari bagaimana mereka mengonsumsi media. Keterlibatan individu akan isu-isu publik biasanya dimulai dari kegiatan memperoleh informasi melalui media dan membicarakan atau mendiskusikannya dengan orang lain baik dalam ruang nyata (tatap muka) maupun dalam ruang *virtual* (melalui social media). Kegiatan ini akan membentuk ruang publik (*public sphere*) yang akhirnya mendorong keinginan seseorang baik secara individu maupun kolektif untuk mengetahui lebih dalam, terlibat/berorientasi dan bertindak lebih jauh terhadap isu tersebut.

Pada tulisan ini, *civic engagement* yang ingin kami jabarkan bukan hanya pada konteks politik namun bagaimana peran anak muda untuk terlibat dalam isu-isu umum seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan, juga akan mendeskripsikan bentuk-bentuk media yang digunakan *digital activist* dalam melakukan aktivitasnya.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Jenkins (2006:7) mendefinisikan *participatory cultures* terutama yang berhubungan dengan teknologi mempunyai hambatan yang rendah dalam mengungkapkan ekspresi dan untuk terlibat dalam isu-isu sosial. Para anggota yang tergabung juga menganggap kontribusi mereka penting. Konteks dari digital activism merujuk pada kegiatan politik, sosial dan ekonomi. Hal ini berarti internet memberdayakan orang-orang dalam mass broadcast, kolaborasi dan aksi massa. Internet mengumpulkan dan mengembangkan uang dan kekuasaan serta melibatkan seluruh kegiatan komunikasi massa. Namun terhubung dengan internet bukan berarti menjadikan seseorang menjadi aktivis digital, namun intensitas dan kemudahan untuk berkecimpung di dalam dunia digital yang membuat seseorang dapat disebut sebagai seorang aktivis digital.

**Digital activism** menunjukkan perubahan ‘masyarakat informasi’. Transformasi ini bukan merupakan bentuk gangguan atau hal yang revolusioner seperti yang telah ditegaskan sebelumnya, namun di lain pihak merupakan hasil dari banyak observasi dalam kemunculan internet. (Breindl, 2010). Individu dan masyarakat umum secara terorganisir memiliki peningkatan dalam penggunaan media sosial sebagai alat kampanye. Popularitas media sosial di Indonesia menunjukkan kenaikan pengguna media sosial saat ini dan tren terbaru menyatakan bahwa penggunaan media sosial merujuk pada publikasi berbagai hal yang berkontribusi dalam perkembangan berita dan informasi di antara masyarakat. Mayoritas pengguna media menggunakan jaringan sosial dalam pemenuhan kebutuhan akan berita yang bahkan belum bisa diverifikasi dengan benar. Masyarakat telah mendapatkan keuntungan dari penggunaan media untuk kepentingan politik dan sosial; hal ini juga dalam pemenuhan dukungan dengan sesama pengguna jejaring sosial untuk menekan pemerintah agar mengabulkan permintaan mereka secara politis (Ambardi, 2014)

Jadi, kampanye *digital activism* merupakan bentuk usaha dari masyarakat yang terorganisir, mengumpulkan klaim yang kolektif dalam mencapai kekuasaan, dengan adanya inisiator atau pendukung yang menggunakan media digital. Digital activism telah mendemonstrasikan dampak yang positif dalam menggalang kekuatan masyarakat di jalanan untuk menggugat, terutama ketika grup masyarakat civil yang menggunakan alat digital dan memiliki tujuan untuk mengubah peraturan pemerintah. (Edwards, Howard, Joyce 2013).

Sejalan dengan asumsi ini, dalam serangkaian studi yang dilakukan oleh Peter Dahlgren (2012; 2009, 2006) yang membangun konsep tentang *civic culture* (budaya publik), yaitu konsep bagaimana orang-orang membangun dan melihat dirinya sebagai insan atau potensial partisan yang memiliki kemampuan untuk melibatkan dirinya dalam permasalahan sosial. Menurut Dahlgren, budaya politik beroperasi secara maksimal melalui media, contohnya keterikatan dengan berita-berita aktual di media dapat dilihat sebagai bagian dari *civil society*. Tindakan dan keinginan untuk selalu mengikuti (*keep up*) dengan isu-isu yang ada di masyarakat dapat dipandang sebagai elemen atau ciri kewarganegaraan. Aktivitas oleh non jurnalis yang menggunakan *platform* seperti facebook, twitter, blogs, dan youtube, untuk mendistribusikan materi jurnalistik yang menjadikan informasi yang penting semakin beragam, interaktif, partisan dan cepat tersebar di masyarakat. Dahlgren mempercayai bahwa urusan politis adalah sesuatu

yang seharusnya terjadi dan dilakukan ditengah-tengah masyarakat, dan bukan di luar masyarakat (oleh sekelompok elite tertentu). Sebagai contoh, ‘*talk*’ (diskusi) antara individu dalam masyarakat adalah suatu bentuk komunikasi yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat untuk membangun sikap sensitif dan kritis terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah pendekatan yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata kata dan perbuatan-perbuatan manusia dengan cara interpretasi (Afrizal, 2005; 14). Pada penelitian ini metode kualitatif digunakan sebagai data primer dan kusioner sebagai data sekunder. Metode kualitatif dipilih untuk bisa menjelaskan bagaimana bentuk partisipasi publik anak muda di Kota Padang dengan menggunakan media baru. Teknik kusioner digunakan untuk mengetahui pola konsumsi media masyarakat di Kota Padang dan melakukan perbandingan bagaimana masyarakat Kota Padang menggunakan media berdasarkan usia. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan kusioner. Pemilihan informan berdasarkan purposive sampling, yakni pemilihan berdasarkan tujuan dari tulisan ini. Peneliti mewawancarai mahasiswa, penggerak akun media sosial, aktivis dan juga wartawan. Pengumpulan data dengan menggunakan kusioner menggunakan teknik simple random sampling, ada empat Kelurahan yang menjadi sample, yakni Kelurahan Lapai, Jati, Ujung Gurun dan Parupuk Tabing. Ada 54 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini yang berusia di bawah 34 tahun. Usia 34 tahun dipilih berdasarkan temuan APJII (2012) yang menyatakan usia dia atas 34 tahun merupakan usia yang belum akrab dengan teknologi. Usia di bawah 34 tahun disebut sebagai digital native, kelompok tersebut mengadopsi teknologi tanpa harus diajari, sedangkan usia di atas 34 tahun disebut digital immigrant, kelompok dimana mereka mendapat pengetahuan teknologi dengan belajar kepada orang lain atau mereka butuh waktu lama mengadopsi teknologi tersebut.

### D. PEMBAHASAN

#### *Digital Activism dan Media Uses*

Peran media terhadap pembentukan wacana yang membentuk ruang public (public sphere) di masyarakat tentunya sangat penting. Berbagai argumentasi, baik yang optimis maupun yang pesimis, menyoroti bagaimana media bagaikan pisau bermata dua memiliki potensi untuk menjadikan masyarakat demokratik yang sensitif terhadap masalah publik atau sebaliknya membuat menjauhkan masyarakat permasalahan-permasalahan riil (Nugroho et al. 2012b). Idealnya, melalui media masyarakat bisa memperoleh, membangun sekaligus menyebarkan wacana atau opini yang dianggap penting bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Media secara tidak langsung telah menghubungkan masyarakat dengan isu-isu publik (public concerns) tanpa dibatasi jarak dan waktu.

Berdasarkan data dari kuesioner, menunjukkan penggunaan media online di kalangan anak muda mencapai 68,5%, jika dibandingkan dengan penggunaan televisi yang 29,6% penggunaan internet jauh lebih unggul dibandingkan televisi. Angka ini juga memperlihatkan adanya peralihan (shifting) penggunaan media, dimana sebelum tahun 2010 media konvensional seperti televisi masih dominan, namun sekarang dengan keberadaan internet terjadi perpindahan ke media online. Waktu yang dihabiskan responden dalam menggunakan media online juga cukup banyak sekitar 73% responden menggunakan waktunya lebih dari 4 jam per harinya untuk mengakses internet. Data ini untuk memperlihatkan bahwa penggunaan media online di kalangan anak muda di Kota Padang sudah memperlihatkan angka dan jumlah kuantitas akses yang signifikan.

Namun sayangnya, pemerintah Kota/ Daerah di Sumatera Barat belum banyak mengoptimalkan internet sebagai jalur berkomunikasi dengan masyarakat. Jika pun ada maka informasi yang disampaikan lebih bersifat seremonial, menginformasikan kegiatan pejabat buka sebagai sarana masyarakat untuk mendapatkan informasi. Riri (21 tahun) seorang mahasiswa di Universitas Andalas, melihat pemerintah belum berminat merangkul anak muda untuk turut berpartisipasi dalam isu publik, hal ini ia lihat ketika pemerintah tidak hadir di dunia maya, dunia yang notabene akrab dengan dunia maya. Riri melihat tindakan pemerintah tersebut juga dilatar belakangi oleh belum mampunya pemerintah mengadopsi perkembangan teknologi komunikasi:

*“ Mungkin karena pegawai pemerintah banyak yang berusia tua, jadi mereka belum mampu menggunakan social network (Wawancara dengan Riri, 21 tahun)”*

Menurut Castell (2008) penurunan kemampuan pemerintah dalam mengatur dan menyelesaikan masalah di masyarakatnya telah memunculkan apa yang ia sebut sebagai *civil society*. Pada konteks masyarakat global, *civil society* bisa dilihat dari Demonstrasi di Mesir tahun 2010 yang berhasil menggulingkan rezim Hoesni Mubarak. Ketika semua saluran media dikuasai oleh pemerintah, masyarakat memanfaatkan sosial media seperti facebook untuk memberikan opini, berdiskusi, menggalang massa dan berkoordinasi.

Pada konteks nasional sudah banyak kasus yang bisa dijadikan contoh bagaimana media, terutama pada saat ini new media bisa mempengaruhi pemerintah dan politisi dalam mengambil keputusan. Grup-grup facebook bisa digunakan untuk menggalang massa dalam segi kuantitas, untuk menunjukkan pendapat PRO atau Kontra tentang suatu kebijakan. Grup yang mendukung upaya pimpinan KPK (Kasus Cicak dan Buaya) adalah salah satu contoh bagaimana grup facebook dijadikan penggalangan dukungan. Hastag # digunakan di twitter untuk menyampaikan wacana dalam waktu singkat. Hastag juga bisa kita gunakan untuk melihat apa yang sedang dibicarakan (trending topic) orang di twitter. Ketika mendekati pemilu tahun 2014, #ayo nyoblos #gue nyoblos banyak beredar untuk mengajak masyarakat terutama anak muda untuk memilih dan jangan golput. Sebaliknya #gue golput juga banyak beredar yang mewacanakan keburukan politikus dan memilih sama artinya dengan mensupport politik Indonesia yang sudah bobrok.

Bukan hanya kasus yang terjadi pada skala nasional saja yang mendapat sorotan para pengguna new media. Dengan adanya internet masyarakat di daerah bisa juga menyalurkan atau

menggalang opini tentang apa yang terjadi di masyarakat tersebut. Pada saat terjadi bencana asap di Provinsi Riau banyak beredar #Melawan asap, yang mendorong pemerintah untuk lebih memberi perhatian terhadap banyaknya kebakaran lahan yang disengaja sehingga menyebabkan bencana asap di Provinsi Riau. Hastag# ini juga dialamatkan atau dmention kepada akun resmi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, agar Presiden bisa lebih tegas menindak para pembakar lahan. Di social media lainnya seperti BBM Group juga banyak beredar Display Picture (DP) karikatur yang menceritakan Gubernur Provinsi Riau kewalahan dan meminta bantuan kepada SBY agar ikut membantu menangani kabut asap. Akhirnya Presiden SBY melawat ke Pekanbaru dan lewat bantuan hujan buatan Pekanbaru pada hari itu juga dilanda hujan yang membantu mengurangi kabut asap.

Di Sumatera Barat, 1000 guru Sumbar adalah salah satu contoh bagaimana pemanfaatan sosial media demi kepentingan isu publik, pada konteks ini isu pendidikan. Lewat instagram @1000\_guru\_sumbar, anak-anak muda ini mengadakan program mengajar di daerah pedalaman Sumatera Barat. 1000 guru Sumbar sendiri merupakan cabang atau bagian dari 1000guru Pusat. Akun ini sudah mulai aktif pada tahun 2014 dan sudah beberapa kali mengadakan kegiatan pendidikan di daerah terpencil di Sumatera Barat. Berikut di bawah ini adalah capture screen dari akun 1000 guru Sumbar.

**Gambar 2. Capture Screen Akun 1000 Guru Sumbar**



Sumber: Instagram (2016)

Dalam mediapolis yang diformulasikan oleh Silverstone (2007), unsur *appearance* atau keaktifan dalam menggunakan media akan menggiring kepada kekuasaan untuk mempengaruhi sebuah keputusan baik bersifat sosial atau politik. Unsur keaktifan ini yang belakangan banyak muncul seiring dengan adanya sosial media membuat orang bisa menyampaikan aspirasi mereka kapan saja dan dimana saja tidak terhalang waktu dan tempat walau hanya melalui kicauan twitter saja, atau menyertakan lembaga tersebut dalam tweetnya dengan cara *mention*.

Menurut Gladwell dan Shirky (2011) social media berkontribusi dalam mengakhiri hubungan tradisional yang selama ini terjadi antara pengambil keputusan (dalam konteks ini pemerintah) dan publik, membuat kelompok yang selama ini tidak mempunyai atau dibatasi aksesnya untuk berkolaborasi, berkoordinasi dan memberikan suara mereka. Bukan hanya akses kepada pemerintah yang terbuka tapi juga akses kepada masyarakat lain sehingga bisa saja terjadi gerakan sosial atau politik yang akan meluas mejadi gerakan social secara nyata, misalnya saja revolusi di Mesir yang dikoordinasikan lewat Facebook. John Baglow (2011: 2) juga melihat bahwa teknologi baru seperti halnya social network membuat hubungan antar manusia menjadi egaliter, instan, tidak dibatasi dan tidak ada keterikatan (individu bisa masuk atau keluar kapanpun), anonym dan nonlinear. Kehadiran 1000guru juga salah satunya untuk “menyentil” pemerintah. Komunitas anak muda ini ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa tanpa pemerintah mereka bisa berkontribusi pada dunia pendidikan. Karenanya 1000guru tidak ada keinginan untuk meminta bantuan kepada pemerintah atau melakukan koordinasi. Dana untuk kegiatan mereka kumpulkan dari donator yang bersedia membantu dan juga dari dana relawan 1000guru.

Instagram digunakan selain karena 1000guru pusat juga menggunakan instagram juga Rocky sebagai admin melihat anak muda di Kota Padang terutama mahasiswa lebih banyak menggunakan instagram dibandingkan facebook dan twitter. Instagram digunakan untuk mengupload berita dan kegiatan 1000guru Sumbar, sedangkan untuk koordinasi internal 1000guru se Indonesia mereka menggunakan media grup di Whats App. Walaupun menggunakan media online, bukan berarti mereka tidak memerlukan tatap muka untuk beraktivitas dan melakukan koordinasi. Media offline digunakan untuk tindak lanjut dari kampanye online yang sudah mereka lakukan, misalnya untuk perekrutan anggota diumumkan lewat instargam kemudian dilakukan perekrutan offline sesuai dengan tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Shirky (2011) yang menyatakan bahwa *new media* bukanlah sebagai pengganti aktivitas di dunia sebenarnya namun hanya sebagai alat untuk mengkoordinasi. Berdasarkan pernyataan ini kita bisa berasumsi bahwa tetap diperlukan tindakan nyata namun pada tataran proses pengambilan keputusan social network bisa menjadi ruang public tempat dimana masyarakat berkumpul untuk menyampaikan pendapatnya.

### **Bentuk dan Karakteristik Partisipasi Publik**

Aktivitas lewat internet terutama di new media bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Masyarakat biasa bisa ikut terlibat terhadap *public discourse* yang sedang dibicarakan. Public participation di new media bisa mendorong cyber democracy, agar demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan efektif maka sangat penting untuk menyusun strategi dan model penggunaan dan adopsi teknologi dalam masyarakat agar bisa memberikan dampak yang lebih signifikan dari public participation di new media.

Masa depan demokrasi di Indonesia berada di tangan pemuda, sayangnya pemuda sendiri terutama di Kota Padang berusaha menghindari isu-isu politik terutama demokrasi. Mereka lebih memilih bergerak di bidang sosial dibandingkan politik, bahkan menurut Rocky sebagai admin

akun 1000 guru Sumbar, isu politik memang sengaja dihindari karena dianggap bukan bagian dari mereka. 1000 Guru Sumbar misalnya tidak pernah berusaha melibatkan pemerintah dalam setiap kegiatan *on line* atau *off line*, bahkan menurut Rocky kegiatan ini sebenarnya juga ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa mereka bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan pemerintah. Pada konteks ini bisa kita lihat adanya ketidakpercayaan pemerintah sebagai institusi yang menjamin pendidikan warga negaranya. Ketidakpercayaan ini juga menjadi salah satu alasan munculnya 1000 guru.

Motivasi anak muda untuk berpartisipasi bisa sangat beragam. Mulai dari mengisi waktu luang, karena sudah terbiasa berorganisasi sampai ingin eksis. Keberadaan sosial media memungkinkan mereka untuk mengupload semua kegiatannya, hal ini dipercaya bisa meng upgrade nilai mereka secara sosial di depan teman-temannya. Ada beberapa anggota yang terlibat hanya karena ingin foto-foto dan selfie saja kemudian upload photo dan membuat caption yang menasehati atau positif. Perilaku seperti ini tidak ditampik oleh Rocky terlihat dari beberapa orang yang pernah terlibat di kegiatan mereka. Biasanya orang yang hanya ingin mencari eksistensi biasanya tidak akan bertahan lama, berbeda dengan orang yang benar-benar tertarik untuk berkontribusi di dunia pendidikan.

Namun keberadaan aktivis yang memanfaatkan sosial media (*digital activist*) juga memunculkan pertanyaan sejauh mana gerakan ini melibatkan masyarakat, apakah gerakan ini menstimulus partisipasi masyarakat-terutama anak muda- untuk terlibat ke isu-isu publik? Debat tentang bagaimana peran anak muda dalam partisipasi politik bisa dibagi menjadi dua pandangan. Pandangan pertama berasal dari Putnam (2006) yang melihat media terutama televisi telah menjadikan anak muda sebagai “generational displacement” dimana mereka menjadi passive dan terputus dari isu-isu publik. Bennett (1998) menjelaskan bawa banyak anak muda yang berkurang keinginannya untuk berpartisipasi di isu publik dan lebih memilih lifestyle. Pandangan selanjutnya dari Jenkins (2006) yang terdengar lebih optimis memandang, generasi sekarang telah membentuk caranya sendiri untuk berkontribusi dalam partisipasi politik. Menurut Nick Couldry bahwa pengalaman bermedia kita berubah karena teknologi yang kita gunakan juga berkembang (Couldry, 2012:19). Pengalaman bermedia juga merubah cara anak muda untuk berpartisipasi menyampaikan pendapatnya. Jika pada era 90 dan 2000an, demonstrasi masih menjadi pilihan, kini cara tersebut dianggap tidak efektif lagi. Mereka juga menganggap penyaluran aspirasi seperti demonstrasi bukan lah sebuah pilihan pada saat ini. Selain merepotkan dari sisi tenaga dan waktu, sosial media dipilih karena kepraktisan dan juga tepat sasaran. Jika ingin menyampaikan pendapat cukup mention akun pejabat atau pihak yang berkepentingan.

Berbeda dengan media konvensional, dimana konten media sudah diatur dan dibuat oleh media, media internet menawarkan fleksibilitas konten media. Audience bisa memilih konten media sesuai dengan pilihan pribadi. Personal preference seorang audience bisa berbeda per individu. Artinya, audience lebih aktif dan selektif ketika memilih media yang akan mereka konsumsi. Isu-isu publik yang ada di internet banyak sekali yang bisa kita temukan, mulai dari panasnya Pilkada DKI sampai kepada kasus pembunuhan Mirna. Jika kita tarik pada konteks

lokal Kota Padang, sampai saat ini belum ada isu lokal Kota Padang yang menjadi trending topik. Sayangnya lagi, isu-isu publik di Kota Padang belum banyak dibicarakan di ruang publik sosial media. Bahkan pada saat pelaksanaan Pilkada Kota Padang dan Sumbar yang melibatkan masyarakat juga tidak banyak bermunculan.

Kesadaran masyarakat Kota Padang untuk lebih mengetahui isu-isu untuk kepentingan bersama juga dirasakan kurang oleh Noval, sebagai Plt. Pemimpin Redaksi Padang Tv. Padang Tv menyadari bahwa anak muda sudah jarang menonton televisi, karenanya berita yang sudah tayang di Padang TV biasanya akan diupload ke You Tube. Noval melihat kecenderungan masyarakat mengkonsumsi berita sesuai dengan latar belakang pekerjaannya. Sebaliknya jika isu tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya dan berbeda latar belakang pekerjaan atau pendidikan maka mereka biasanya hanya sebatas tahu saja tanpa melakukan suatu tindakan. Jika isu tersebut menyangkut kepentingan mereka sebagai individu, maka mereka akan peduli salah satu cara yakni mencari informasi lewat media massa.

## E. SIMPULAN

Keterlibatan pemuda di Kota Padang dengan menggunakan media sosial telah memberikan kontribusi terhadap isu-isu sosial terutama pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Namun aktivitas ini belum memperlihatkan kaitan dengan program yang ada di pemerintah. Kegiatan yang ada merupakan bagian dari jaringan nasional, namun belum terlihat adanya jaringan antar komunitas lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, K., Parahita, G., Lindawati, L., Sukarno, A., Aprilia, N., Dragomir, M.& Reljic, D. 2014. Mapping Digital Media: Indonesia.
- APJII. 2012. Profil Pengguna Internet Indonesia. Jakarta
- Bennett, W. L. 1998. The uncivic culture: Communication, identity, and the rise of lifestyle politics. *PS: Political Science & Politics*, 31(04), 741-761.
- Breindl, Y. 2010. Internet-Based Protest in European Policymaking: The Case of Digital Activism. *International Journal of E-Politics (IJEP)*, 1(1), 57-72.
- Castell.2008. *The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks and Global Governance*. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science (616:78)
- Cohen, C.J., Kahne, J., 2012. Participatory Politics: New Media and Youth Political Action. YPPSP (Youth & Participatory Politics Survey Project). Oakland, CA: YPP Research Network.
- Couldry, N. (2007). ‘Culture and Citizenship: the Missing Link?’ *European Journal of Cultural Studies*, 9(3): 321–40.
- Dahlgren, Peter . 2006. *Doing citizenship The cultural origins of civic agency in the public sphere*. In *European Journal of Cultural Studies* 9 (3), pp. 267–286.
- Dahlgren, Peter. 2009. *Media and political engagement*: Cambridge University Press Cambridge.

- Dahlgren, Peter. 2012. *Reinventing participation: civic agency and the web environment*. In *Geopolitics, History, and International Relations* (2), pp. 27–45
- Edwards, Frank and Howard, Philip N. and Joyce, Mary, *Digital Activism and Non-Violent Conflict* . 2013. . Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2595115> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2595115>
- Giddens 2001. *Runaway World*.
- Gladwell, M., & Shirky, C. 2011. From innovation to revolution: Do social media make protests possible?. *Foreign Affairs*, 90(2), 153.
- Jenkins, H. 2006. *Convergence culture: Where old and new media collide*. NYU press.
- Nugroho, Yanuar; Nugraha, Leonardus K.; Laksmi, Shita; Amalia, Mirta; Putri, Dinita Andriani; Amalia, Dwitri 2012: *Media and the vulnerable in Indonesia: Accounts from the margins*. In *Engaging Media, Empowering Society: Assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens' rights*.
- Pawito, 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Aksara
- Putnam, R. 2006. *2000Bowling alone: the collapse and revival of American community* Simon and Schuster. *New York*.
- Shirky, Clay. 2011. *The Political Power Of Social Media : Technology, The Public Sphere, and Political Change*. Forreign Affairs.
- Silverstone, Roger. 2007. *Media and Morality: On the Rise of the Mediapolis*, Cambridge: Polity